

Jurnal Ilmiah

PEURADEUN

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



**Americanizing Islam As The Price of Assimilation
(disentagling Religion and Culture)**

John H. Morgan

**The Ritual of Marriage
(An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-south Aceh)**

Abdul Manan

Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme

Otto Gusti Madung

**Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan
Syariat Islam di Provinsi Aceh**

Muhibbuthabry

Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat

Jasafat

علي هاشمي هو زعيم الاصلاح في مجال التربية بأنتشية

Syabuddin Gade

أصول التفسير عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير القرآن

Andri Nirwana AN

JIP

International Multidisciplinary Journal
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465
ORCID iDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217
Google Scholar Index-I:3, I10: 3

 Copernicus Publications
The Innovative Open Access Publisher


SCAD Independent
IAO Accreditation
4-8362/387/IAO/2014



KONSEP PENDIDIKAN JERMAN DAN AUSTRALIA (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia)

Saifullah¹

Abstract

Education system for a nation to be essentially in accordance with the philosophy and culture itself. Taking over a system or idea in the field of education of other nations must be assessed by the application of existing cultural backgrounds. Therefore, to compare the educational systems of Germany and Australia also we need to adapt to the culture and philosophy of the nation. It is interesting in this discussion is the implementation of the education in the world has a different implementation in each country, so that it can be a barometer in improving the quality of education. In this paper writer try to educate how the structure of education and type of education, education management system, the system of education management organizations, educational assessment system, the financing of education and academic degrees as applicable comparative study of German and Australian education to improve the quality of education in Indonesia.

مستخلص

نظام التعليم لأمة أن تكون أساسا وفقا لفلسفة والثقافة نفسها استيلاء على نظام أو فكرة في مجال التعليم من دول أخرى يجب أن تقييم من خلال تطبيق الخلفيات الثقافية القائمة . لذلك، لمقارنة الأنظمة التعليمية من ألمانيا وأستراليا أيضا نحن بحاجة إلى التكيف مع ثقافة وفلسفة الأمم من المثير للاهتمام في هذه المناقشة هو تنفيذ التعليم في العالم لديه تنفيذ مختلفة في كل بلد، بحيث أنه يمكن أن

¹ Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menyelesaikan doktoral dalam bidang ilmu Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Januari 2014.

يكون مقياسا في تحسين نوعية التعليم في هذه الورقة نحاول تتقيف كيف هيكل التعليم ونوع التعليم، ونظام إدارة التعليم، ونظام منظمات إدارة التعليم، ونظام التقويم التربوي، وتمويل التعليم والدرجات العلمية كدراسة مقارنة تنطبق التعليم الألمانية والاسترالية لتحسين نوعية التعليم في إندونيسيا

Keywords: *Educational Concepts, Germany, Australia, Indonesia*

A. Pendahuluan

Suatu hal yang menarik dikaji dan dipelajari dewasa ini adalah tentang pendidikan komparatif. Minat pada studi pendidikan komparatif mencapai puncaknya yang signifikan terjadi sejak Perang Dunia II. Minat ini sebagian merefleksikan runtuhnya paham kedaerahan yang bertahun-tahun silam tumbuh subur di belakang tapal batas negara-negara, sebagian lagi merefleksikan bangkitnya internasionalisme agresif pada negara atau kelompok negara yang bertekad tidak mau kalah dengan berlomba-lomba dalam upaya untuk menjadi pemimpin dunia dalam bidang apapun. Selain faktor-faktor ini, timbul pula keresahan lantaran adanya perbedaan ekonomi, sosial dan budaya yang besar di antara beberapa kelompok populasi dunia.

Studi komparatif di mulai di Barat dalam situasi yang pada dasarnya sama sekali berlainan. Setelah Abad kegelapan, pendidikan di Barat tak banyak ditiru atau disebarkan ke luar negeri sebagai cara penaklukan. Pendidikan di Barat disediakan di Gereja Katolik Roma. Selama berabad-abad, Gereja Katolik Roma mengklaim hak eksklusif untuk menyelenggarakan sekolah. Gereja Katolik Roma dulu dan sekarang merupakan institusi internasional dengan kontrol administratif hierarkis yang sangat terpusat. Namun setelah reformasi, monopoli gereja dalam pendidikan tak lagi diperkenalkan.

Negara-negara merdeka yang bermunculan akibat kekalutan perang agama banyak yang memeluk agama Protestan. Beberapa negara Jerman khususnya memelopori pengembangan sistem pendidikan nasional yang hasilnya sangat memuaskan sehingga terus berkembang dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Australia dan lain sebagainya (Don Adams, 2005: 2).

Studi perbandingan ini pada dasarnya diharapkan dapat mengembangkan sumber daya pribadi intelektual dengan melengkapinya

dengan informasi tentang aspirasi, gagasan dan pengalaman orang lain. Seperti kita ketahui, pendidikan telah menjadi sebuah keniscayaan bagi peningkatan kualitas kehidupan baik secara individual maupun kolektif. Keyakinan akan urgensi pendidikan telah mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyesuaian terhadap keunikan setiap komunitas yang umumnya terkait dengan nilai, ritual, teladan dan simbol (Agustiar Syahnur, 2001:9), setiap bangsa mengembangkan sistem pendidikan yang dipandang unggul dan mampu menjadi sarana yang ideal bagi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Saat ini bisa kita lihat beragam sistem pendidikan di dunia, yang sering kali dibangun berdasar prinsip pendidikan yang persis sama, namun tetap kaya dengan perbedaan di berbagai tingkatan kebijakan dan teknis pelaksanaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong para penggiat pendidikan untuk meninggalkan pola pandang sempit dalam mengembangkan sistem pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat melalui kaca mata kuda, di mana para pengambil kebijakan di bidang pendidikan hanya terfokus pada sistem pendidikan sendiri. Semakin berkembang kesadaran bahwa pola pandang egosentris hanya akan menjadikan sistem pendidikan sebuah bangsa rentan terhadap risiko stagnasi pendidikan yang akan menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi terhambat akibat tidak adanya upaya *benchmarking* dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pihak lain. Tanpa ada bandingan, kerap seseorang terjebak dalam pola pandang "baik sendiri".

Terkait dengan tumbuhnya kesadaran ini, berkembang pemahaman mengenai upaya membandingkan sistem pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan lainnya. Tujuan utama dari studi komparatif ini adalah melakukan upaya *benchmarking* agar posisi sistem pendidikan yang ada di negeri sendiri bisa diketahui. Dengan demikian, penguatan keunggulan dan perbaikan kelemahan akan dapat dilakukan secara akurat, efektif dan efisien. Dalam skala yang lebih kecil, sebuah lembaga pendidikan dapat mengambil perbandingan dengan lembaga pendidikan lain.

Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mencoba membahas dan menguraikan bagaimana konsep pendidikan Jerman dan Australia serta pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia dalam peningkatan mutu dan kualitas?. Mengingat ada beberapa faktor penting dalam mengkaji studi perbandingan pendidikan khususnya untuk mahasiswa, baik dalam perspektif sosial, religius, politik, ekonomi, bahkan letak geografis.²

Negara Jerman dan Australia dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem pendidikannya. Saat ini, Jerman dan Australia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, "hanya" sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II (Institut für Auslandsbeziehungen: 1986). Berbagai keunggulan Jerman dan Australia di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II. Tak aneh bila saat ini Jerman dan juga Australia menjadi negara tujuan bagi banyak mahasiswa internasional, termasuk Amerika Serikat, yang ingin mendapatkan salah satu pendidikan terbaik di dunia.

B. Pembahasan

1. Sistem Pendidikan di Jerman

Berdasarkan sejarah pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber; *gereja* dan *negara*. Awal abad pertengahan gereja selalu terlibat dalam pendidikan, akan tetapi sejak akhir abad ke-17 pendidikan resmi menjadi tanggung jawab negara. Semenjak itu pula, pengaruh gereja secara umum mulai berkurang.

a. Politik dan Tujuan Pendidikan

Dengan sejarah kelam yang bertumpu pada pengalaman kekalahan dalam dua perang dunia dan hancurnya negara Jerman, masyarakat Jerman

² Adapun faktor-faktor tersebut adalah; (1) Rasa persatuan nasional, (2) Situasi umum perekonomian, (3) Kepercayaan dan tradisi utama, termasuk peninggalan religius dan budaya, (4) Status pemikiran pendidikan progresif, (5) Persoalan bahasa, (6) Latar belakang politik: komunisme dan demokrasi, (7) Sikap terhadap kerja sama dan pemahaman internasional (Lihat dalam John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, 1956: 5).

mulai membangun sistem pendidikan yang terbebas dari potensi membuat kesalahan serupa, yaitu dengan memisahkan kekuasaan, termasuk dalam bidang pendidikan, agar tidak tertumpu pada satu lembaga atau satu orang saja. Hal ini dilakukan karena memandang pengaruh absolut Hitler yang membuat seluruh Jerman bergerak ke arah kehancuran (Robert F. Lawson, 2000). Pendidikan diarahkan kepada penanaman kemauan yang kuat untuk bangkit dan keahlian yang dibutuhkan untuk kembali berdiri sebagai negara yang kokoh dan mandiri. Di samping itu, terpecahnya Jerman menjadi dua bagian untuk waktu yang lama menjadikan isu persatuan sebagai salah satu isu penting dalam budaya pendidikan Jerman.

Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama, dalam hal ini gereja sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara (Agustiar Syahnur, 2001:156).

Saat ini, wajib belajar berlangsung mulai usia 6 tahun sampai 18 tahun, jadi selama 12-13 tahun. Untuk memenuhi wajib belajar harus dikunjungi sebuah sekolah penuh-waktu selama 9 tahun (di negara bagian tertentu 10 tahun) dan setelah itu memasuki sekolah kejuruan paruh waktu dan sekolah penuh-waktu yang lain. Dengan demikian, sistem pendidikan Jerman di beberapa negara bagian membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan Indonesia. Bila di Indonesia dari SD sampai dengan siap mengikuti kuliah membutuhkan waktu 12 tahun, di Jerman dibutuhkan 13 tahun untuk menyelesaikan sekolah.

b. Struktur dan Jenis Pendidikan: Pendidikan Dasar, Menengah serta Pendidikan Tinggi

Kindergarten (Taman Kanak-Kanak) dimulai dari umur 3-6 Tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Vorschulische Einrichtungen*", yang berarti "Persiapan sebelum Pendidikan". Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermanya "*Kindergarten*".

Penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial dan komune, kadang-kadang juga perusahaan dan perkumpulan (J. T. Fey, 1985: 125).

Setelah *Kindergarten* dimulai pendidikan dasar pada usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Grundschule*", yang berarti "Sekolah Dasar". Dari *Grundschule*, seseorang mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut: 1). *Hauptschule* (kelas 5 - 9/10), 2). *Realschule* (kelas 5 - 10). 3). *Gesamtschule* (kelas 5 - 13), 4). *Gymnasium* (kelas 5 - 13) (Frackman, dkk, 199: 182).

Untuk memasuki *Hauptschule*, *Realschule* atau *Gymnasium*, seseorang harus melalui "*Orientierungsstufe*" (Tahapan Orientasi). Di tahap ini diteliti bakat dan kemampuan dari anak, dan tahap ini menentukan kemana tujuan seorang anak selanjutnya. *Hauptschule* dan *Realschule* lebih ditekankan kepada anak yang ingin langsung kerja bila telah menyelesaikan sekolah. Tentu saja setelah melalui pendidikan di "*Berufsfachschule*" atau "*Fachoberschule*". Bagi yang ingin melanjutkan ke Universitas, jalan tercepat adalah melalui *Gymnasium*. Jalan pendidikan lain juga dapat mengikuti kuliah di universitas, tapi dengan melalui jalan yang panjang. Misal harus melakukan praktek kerja dahulu selama sekian tahun.

Sebelum memasuki kuliah, para pria di Jerman diwajibkan untuk memasuki "Wajib Militer". Bila seseorang dengan alasan kesehatan tidak dapat mengikuti "Wajib Militer" maka sebagai gantinya ia harus menjalani "*Zivilliansdienst*" atau lebih dikenal dengan Zivis. Zivis ini bekerja di rumah sakit, badan sosial ataupun badan pendidikan dari pemerintah.

Titel yang didapat dari Universitas di Jerman dan Indonesia hampir mirip, namun walaupun namanya sama berbeda tingkatannya. Diploma lulusan Jerman setara dengan S2 atau Master di Indonesia, dan dapat langsung mengikuti program Doktoran (Ph. D). Hal ini berarti S1 di Indonesia, pada dasarnya setara dengan *Vordiplom* di Jerman, tetapi hal ini tergantung dari *Anerkennung der Studienleistungen* (Penyamaan derajat Ijasah). Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu:

- 1) Ijazah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap setara dengan *Vordiplom* (semester 5). Untuk mendapatkan Diploma, ia harus mengikuti semua mata kuliah dari semester 5 sampai dengan pembuatan *Diplomarbeit* (Penulisan Akhir untuk mendapatkan gelar Diploma)
- 2) Ijazah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5. Untuk mendapatkan Diploma, ia hanya diminta untuk mengikuti beberapa ujian untuk penyamaan derajat.
- 3) Ijazah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap sudah mencukupi untuk dapat langsung mengikuti program Doktoran. Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai kemungkinan untuk langsung promosi (S3). Biasanya kalau bidang studi dan kurikulum dari S1 ke promosi (S3) tidak menyimpang jauh, akan mendapat kemudahan pada saat *Anerkennung* (U. Teichler and B. Kehm, 1992: 89).

Di Jerman dikenal ada dua jenis pendidikan tinggi utama yaitu *Fachhochschule* dan *Universität*. *Fachhochschule* yang sering disebut juga FH ini mirip seperti politeknik di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang aplikasi. Bidang teori lebih sedikit dibandingkan dengan praktek atau aplikasinya. Studi di *Fachhochschule* tak dapat mencapai gelar doktor dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri langsung. Jenis pendidikan tinggi lainnya adalah *Musikhochschule* (untuk bidang musik), *Pedagogische Hochschule* (untuk bidang pendidikan, mirip IKIP dahulu) dan *Kunsthochschule* (untuk bidang seni).

Sistem *Universität* (Universitas) di Jerman, berbeda dengan di Indonesia, tidak ada "panduan" ketat per semesternya, dan urutan mata kuliah A, B, C, dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dituntut harus dapat menentukan sendiri, kuliah, latihan, seminar, ujian yang akan diikutinya, dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung memberikan "kebebasan yang sangat besar", tapi bisa juga menjerumuskan mahasiswa ke kondisi terlalu santai (banyak beberapa mahasiswa Indonesia yang terjebak ke situasi ini, di mana sudah 8 tahun tapi belum ujian apa-apa, karena keasyikan kerja atau kesibukan lainnya). Mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri

menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang dia ikuti, dan apa yang dia lakukan dan dia mau.

Model perkuliahan tersusun dari *Vorlesung* (perkuliahan), *Seminar* (semacam diskusi dalam ukuran kecil atau dalam kelompok kecil), dan *Übung* (latihan). Ujian dilakukan langsung dengan Profesor yang bersangkutan. Rata-rata ujian bersifat lisan, walau ada juga yang diberikan secara tulisan. Sistem ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang (untuk mata kuliah yang tidak lulus), namun sering juga hanya sekali saja (boleh mengulang namun tahun berikutnya. bukan semester berikutnya).

Suatu ciri khas belajar di Jerman adalah soal biaya pendidikan tiap semesternya. Untuk semua jenis sekolah publik tidak dipungut biaya. Sarana pelajaran, terutama buku ajar, sebagian diberikan kepada peserta secara cuma-cuma. Pelajaran agama, kecuali di sekolah netral. Menurut undang-undang merupakan pelajaran kokurikuler. Di kebanyakan negara bagian didirikan sekolah Kristen bersama. Keistimewaan ini juga terdapat di negara lain seperti Austria dan negara-negara Skandinavia.

c. Manajemen Pendidikan

Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara bagian. Saat ini, negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian mendorong pihak negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan federal (Agustiar Syahnur, 2001:165-166).

Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan

biaya personil yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggungjawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian.

d. Kurikulum Pendidikan

Materi-materi pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen, yaitu:

- 1) Tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan jenis sekolah
- 2) Pedoman kurikulum
- 3) Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks (H. Mohle, 1992: 82).

Secara umum kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut:

- 1) Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah/sering dinyatakan pada mukadimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum
- 2) Silabus, rekomendasi metode mengajar dan model rencana pelajaran diputuskan oleh kementerian negara
- 3) Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari Kementerian negara bagian dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah
- 4) Metode mengajar, bukan "teacher centered" tetapi "student centered" yang sifatnya "open instruction" (murid belajar atas dorongan sendiri)

e. Evaluasi dan Penelitian Pendidikan

Dalam sistem pendidikan Jerman, tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan sebagaimana di

Indonesia. Evaluasi dalam pengertian evaluasi program, sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi/ panitia.

Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid, sepenuhnya diserahkan kepada guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya digambarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis (terutama pendidikan dasar). Beberapa negara bagian di Jerman bahkan menetapkan kode-kode tersendiri yang bersifat sentral dan standar guna memberikan umpan balik kepada guru agar penilaian yang diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri.

Dalam hal sertifikat tamat belajar, itu menjadi tanggung jawab pejabat tingkat negara bagian, untuk menjamin tercapainya standar minimal. Prosedurnya bervariasi. Pada kebanyakan negara bagian, setelah menyelesaikan pendidikan di *Hauptschule* dan *Realschule* siswa menerima sertifikat yang diakui, sementara tugas yang disiapkan untuk ujian akhir di *Gymnasium* diserahkan dan disetujui oleh kementerian.

2. Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Jerman dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan akan senantiasa bersifat *mobile*, dalam arti mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan bukan merupakan bidang mandiri yang lepas dari pengaruh faktor-faktor eksternal. Di kawasan Asia kajian mungkin lebih mengarah kepada bidang manajemen sistem pendidikan dan kualitas pengajar. Hal ini terungkap dari pendapat yang dikemukakan oleh mantan presiden *Conference Comparative Education Society of Asia* (CESA) Fakry Gaffar dalam sebuah artikel di *The Jakarta Post* edisi Sabtu 12 Juni 2008 pada saat pendeklarasian CESSIA di Universitas Negeri Jakarta bulan Februari 2009. Dengan demikian jelaslah bahwa pembicaraan mengenai sistem pendidikan akan senantiasa beriringan dengan pembicaraan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah ideologi. Ideologi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem

budaya (A. Margrith Lin-Huber, 1998: 56). Ideologi ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain.

Untuk memperoleh gambaran mengenai ideologi yang dijadikan sebagai panutan, maka ada baiknya kita bahas beberapa hal yang mempunyai penjelasan historis yang berimbas pada pembangunan sistem pendidikan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.

a. Landasan Filosofis dan Kebijakan Sistem Pendidikan

Membicarakan sistem pendidikan dari sisi filosofis akan cenderung terkait dengan nilai ideal yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kinerja dalam melihai nilai-nilai perbandingan sistem pendidikan Jerman dengan sistem pendidikan Indonesia. Sebagai contoh, Pancasila yang dijadikan landasan filosofis bangsa Indonesia diharapkan menjadi salah satu pedoman hidup dari bangsa yang terdiri atas beragam latar belakang agama dan suku bangsa ini.

Munculnya berbagai bidang filsafat mengakibatkan adanya perbedaan dalam beragam sistem pendidikan di dunia, tergantung filsafat apa yang dijadikan landasan pembentukannya. Alwasilah mengemukakan bahwa masyarakat cenderung memilih filsafat yang dipercayainya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan dan bersifat kolektif. Karakter masyarakat (dalam ranah yang luas bisa disebut sebagai bangsa) akhirnya bisa dikenali dari filsafat apa yang mereka jadikan landasan bagi semua kinerja kemasyarakatan. Pada gilirannya, filsafat juga akan mempengaruhi pendidikan dalam komunitas terkait. Kurikulum adalah cerminan filsafat yang dipercayai oleh masyarakatnya (Chaedar Alwasilah, 2008: 15-16).

Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan negara yang kalah perang. Kondisi ini mempengaruhi mental rakyatnya yang begitu mengidamkan adanya pemimpin yang bisa membawa mereka menuju kejayaan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Hitler. Setelah berkuasa, Hitler menanamkan keyakinan dan kebanggaan yang chauvimistik kepada para pendukungnya. Untuk memperoleh dukungan luas bagi ambisinya menguasai

Eropa, Hitler mengetengahkan konsep *Lebensraum* dan keunggulan ras bangsa Jerman, ras Arya. Rasionalisasi fasis ini kemudian melandasi sistem pendidikan Jerman saat itu. Pendidikan diarahkan kepada pembentukan sosok manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Dalam bidang keilmuan, pendidikan diarahkan pada penemuan-penemuan ilmiah, utamanya yang bermanfaat bagi pembangunan kekuatan militer Jerman, bidang olahraga bertujuan memunculkan atlet-atlet yang superior seperti juara tinju dunia Max Schmelling. Dalam bidang seni, pembuatan karya seni ditujukan untuk membentuk figur ras Arya yang unggul.

Kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II membuat perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jerman, termasuk pada perubahan filsafat yang dijadikan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan. Berbagai kondisi buruk yang terjadi pasca kekalahan, termasuk terbagi duanya negara Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi awal bagi bangsa Jerman untuk mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Jerman kemudian memandang persatuan (*Einheit*), pembagian kekuasaan agar tidak tertumpuk pada satu orang (*die Macht verteilen*), dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami kehancuran. Dalam pandangan ini bisa kita lihat pengaruh filsafat *Eksistensialisme* yang menekankan kemampuan diri sendiri, filsafat *progresivisme* dengan proporsi sains dan perubahan yang terencana, juga pengaruh filsafat *critical pedagogy* dalam upaya memformulasi ulang kebenaran setelah kehancuran akibat ideologi nazi. Beragamnya landasan filsafat sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem federal. Dalam sistem ini, negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di beberapa negara bagian berbeda dengan satu sama lain.

Pengaruh dari perubahan landasan filsafat pendidikan ini pada gilirannya berimbas pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan federal maupun pemerintahan negara bagian dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas, yaitu:

- 1) Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi.
- 2) Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar. Dibandingkan dengan Indonesia, partisipasi masyarakat Jerman jauh lebih terlihat. Hal ini mencerminkan pemikulan tanggung jawab bersama dan rasa kesatuan antara pemerintah dengan masyarakatnya.
- 4) Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman dapat melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur.
- 5) Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang *nyambil* menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang dimilikinya (Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, 2009: 6-7).

Umumnya semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran yang tinggi di antara para

penggiat pendidikan, rasa tanggung jawab yang dimiliki semua elemen masyarakat dan pengawasan yang mapan.

b. Kajian Kontrastif dengan Indonesia.

Secara falsafi, landasan sistem pendidikan Jerman dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Hal ini terjadi karena pendidikan di manapun adalah hal yang dianggap baik. Pendidikan sejak dulu sampai saat ini di manapun dipandang sebagai sesuatu yang mulia (Chaedar Alwasilah, 2008: 15). Di samping itu, kemiripan latar belakang mestinya juga bisa menimbulkan keinginan yang sama. Jerman mengalami kekalahan total karena kekalahan dalam Perang Dunia II, sehingga sempat diduduki oleh kekuatan militer asing dan Indonesia juga pernah dijajah oleh militer asing. Memang tidak sama antara kekalahan dan penjajahan, namun keduanya melahirkan kondisi mental yang cenderung sama, yaitu adanya ketidaksenangan karena pihak lain mengatur “rumah tangga” sendiri dan keinginan untuk mandiri atau merdeka.

Kesamaan ini tampak dari keinginan kedua bangsa untuk mengedepankan rasa keadilan dengan memberikan akses pendidikan secara merata. Di Indonesia, pemerataan ini tampaknya baru bisa dicantumkan dalam undang-undang dan belum bisa dilaksanakan secara merata di seluruh bagian negeri. Istilah “memisahkan jurang si kaya dan si miskin” yang didengung-dengungkan sejak zaman orde baru, dan tercermin salah satunya dengan mewajibkan pemakaian seragam yang sama secara nasional tidak menutup mata kita untuk menyaksikan, bahwa sistem pendidikan kita untuk sekian lama justru memperbesar jurang si kaya dan si miskin. Si kaya yang punya akses menuju pendidikan yang baik dari tingkat SD apalagi pendidikan tinggi, si kaya yang bisa fokus belajar karena tidak harus membantu ekonomi orang tuanya yang berupaya bertahan hidup, maka si kaya pula yang memperoleh peluang untuk mendapatkan semua lapangan pekerjaan yang upahnya bisa meningkatkan taraf hidup. Umumnya dokter, ahli hukum dan teknolog bukanlah orang yang berasal dari keluarga miskin.

c. *Sistem Pendidikan di Australia*

Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99 persen. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar; lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan; serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat (L. Ingvarson and Chadbourne, 1994: 45).

Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400,000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri (D' Cruz J and P. Langford, 1990: 89).

1) *Tujuan Pendidikan*

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin (lihat di <http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>).

Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.

2) *Struktur dan Jenis Pendidikan*

Di Australia, sekolah dimulai dengan *kindergarten* (taman kanak-kanak) dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi lima strata (tingkatan), yaitu:

- a) Sekolah Dasar (*Primary School*); taman kanak-kanak sampai kelas 6 atau kelas 7 (tergantung pada negara bagiannya)
- b) Sekolah Menengah (*Secondary or High School*); kelas 7 atau 8 sampai kelas 10 (tergantung pada negara bagiannya)
- c) Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (*Vocational Education and Training*) dan *senior high school/senior secondary school/college* (sekolah menengah atas); kelas 11 sampai kelas 12.
- d) Pendidikan Tinggi (*University*).³

Tahun akademik di Australia dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik dibagi ke dalam empat term di mana setiap term yang lamanya kurang lebih 10 minggu. Pada akhir setiap term, para murid mendapatkan dua minggu liburan, namun pada akhir tahun semua murid mendapatkan liburan selama kurang lebih enam minggu.

Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa harus menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

³ Murid di Australia mulai sekolah pada umur 4,5 tahun sampai 5,5 tahun (*kindergarten*). Orang tua murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan usia 15 atau 16 tahun (tergantung pada negara bagiannya). Jika anaknya tidak rajin masuk sekolah, orang tua dikenakan denda/sanksi. Pada tingkat *high school*, semakin tinggi tingkat sekolah, murid semakin bebas memilih mata pelajaran yang akan diambil. Pada tingkat *senior secondary school*, murid boleh memilih hampir semua mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Sebagian besar dari *high school* dan *senior secondary school* juga menawarkan mata pelajaran yang bersifat kejuruan, seperti perhotelan, turisme, muatan lokal; teknik kayu, teknik logam (*hospitality, tourism, woodworking, metal working*). Pada akhir kelas 12, murid sekolah mendapatkan *Year 12 certificate*. Piagam tersebut disertai transkrip nilai mata pelajaran yang telah diambil dengan nilai yang diraih. Untuk sebagian besar dari mata pelajaran pada tingkat kelas 12, nilai siswa dihitung dari tugas sekolah serta hasil ujian di negara bagian yang dilakukan pada akhir tahun. Nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk mendaftar ke universitas, tanpa perlu diuji lagi. Di Australia, terdapat *public schools* (sekolah-sekolah negeri) dan *private schools* (sekolah-sekolah swasta). Kurang lebih dua pertiga dari murid bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya bersekolah di sekolah swasta. *Private schools* di Australia dibagi menjadi dua kelompok: yang berafiliasi pada agama (biasanya Katolik atau Protestan, tetapi ada juga sekolah Islam) dan yang tidak berafiliasi kepada agama (*independent schools*). (Lihat: <http://www.atdiknas-canberra.org/sekolah-sd-sma/sistem-pendidikan-di-australia.html>; Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, *Sistem Pendidikan Australia*, Rabu, 17 Maret 2011).

3) *Manajemen Pendidikan*

a) *Otoritas*

Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian, ia setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Departemen pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf/karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah.

Di samping bantuan dana umum yang diberikan kepada negara bagian, Commonwealth semenjak awal tahun 1970-an, telah pula menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui Komisi Sekolah Commonwealth (*Commonwealth Schools Commission*, disingkat CSC) dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth (*Commonwealth Tertiary Education Commission*), disingkat CTEC (Agustiar Syahnur, 2001: 61).

Universitas dan institusi CAE adalah lembaga-lembaga otonomi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pendanaan bagi lembaga ini sepenuhnya menjadi beban Commonwealth dan dikelola melalui CTEC (*Commonwealth Tertiary Education Council*). Akan tetapi setiap negara bagian membentuk badan koordinasi untuk merencanakan dan mengkaji pendidikan tinggi mengonsultasikannya dengan CTEC.

b) *Kurikulum dan Metodologi Pengajaran*

Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah, tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir; detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, *the Australian Capital*

Territory (ACT) dan *the Northern Territory*, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah.

Pusat Pengembangan Kurikulum (*Curriculum Development Centre, /CDC*) dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi.

Tanggung jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Pada umumnya format pengajaran pada pendidikan dasar ialah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecenderungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Sama halnya di sekolah menengah, hampir semua siswa tetap berada dalam kelompok-kelompok umur yang bersamaan, dan mereka diajar oleh guru-guru bidang studi, dan ada pula kecenderungan untuk mengelompokkan siswa tidak berdasarkan kesamaan umur (*horizontal age grouping*) tetapi beda umur (*vertical age grouping*), diajar oleh tim guru (*team teaching*), dan siswa dikelompokkan dalam format-format kecil. Masalah kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum (*curriculum content*), yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multikultural.

Sesudah tahun 1970, semua departemen pendidikan terlibat dalam peninjauan kembali tujuan, struktur, dan kurikulum. Di antara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti. Di samping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternatif di luar mata kuliah yang sudah ada,

dengan prioritas pada bidang keahlian kejuruan dan teknologi. Tetapi masih banyak lagi tugas yang harus dilakukan.

Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan “*Educating our Children to succeed in the 21th Century*”. Prof. Lesley Parker, Chair of the Curriculum Council, menyatakan rasa bangganya, karena “*The Curriculum Framework was developed through a unique consultative process that involved almost 10.000 teachers, parents, academics, curriculum officers, students and other members of the community*”. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan.

Ada beberapa hal yang menarik dalam *Curriculum Framework*:

Pertama, ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu (1) cultural diversity, (2) changes in the family structure, (3) rapid pace of technologival change, (4) global environmental issues, (5) changing nature of social conditions, (6) change in the workplace, (7) inter-dependence in the global economy, (8) uncertain standards of living.

Kedua, ada lima karakteristik nilai (values) yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu: (1) pursuit of knowledge and commitment to achievement of potential, (2) self acceptance and respect of self, (3) respect and concern for others and their rights, (4) social and civic responsibility, dan (5) environmental responsibility (Lihat dalam Australian Bureau of Statistic, 1993: 8).

Apakah kurikulum di Australia telah menganut konsep kurikulum yang berbasis kompetensi? *Curriculum Framework* tidak menggunakan istilah “berbasis kompetensi” atau “competency-based”, namun menggunakan istilah “*student outcomes statement*” atau dikenal dengan “*overarching statement learning outcomes*”, yang rumusannya pada hakikatnya sama dengan rumusan kompetensi. Ada 13 (tiga belas) *student outcomes statement* yang akan dicapai melalui delapan mata pelajaran secara sinergis dengan menggunakan konsep “*links across the curriculum*”, yaitu: 1) Students use language to understand, develop and communicate ideas and information and to interact with others; 2) Students select, integrate and apply numerical and spatial concepts and techniques; 3) Students recognize when and what information is needed, locate and obtain it from a range of sources and evaluate, use and share it with others; 4) Students select, use and adapt Technologies; 5) Students describe and

reason about patterns, structures and relationship in order to understand, interpret, justify and make patterns; 6) Student visualize consequences, think laterally, recognize opportunity and potential and are prepared to test options; 7) Students understand and appreciate the physical, biological and technological world and have the knowledge and skills and values to make decision in relation to it; 8) Students understand their cultural, geographic and historical context and have the knowledge, skills and values necessary for active participation in life in Australia; 9) Students interact with other people and cultures other than their own and are equipped to contribute to the global Community; 10) Student participate in creative activity of their own and understand and engage with the artistic, cultural and intellectual work of others; 11) Students value and implement practices that promote personal growth and well being; 12) Students are self-motivated and confident in their approach to learning and are able to work individually and collaboratively; dan 13) Students recognize that everyone has the right to feel valued and be safe, and, in this regard, understand their rights and obligations and behave responsible (D' Cruz J and P. Langford (Eds.), 1990: 88).

c) Konsep Evaluasi

Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah.

Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12.

Untuk masuk ke universitas dan CAE pada umumnya diperlukan kualitas performansi tertentu pada tahun pendidikan ke-12, walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang kebetulan tidak memenuhi persyaratan formal. Masuk ke TAFE dimungkinkan setelah menamatkan pendidikan 10 tahun dengan hasil yang memuaskan. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia.

d. Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Australia dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Di lihat dari jenjang pendidikan formal di Australia dan Indonesia yang ditinjau dari lamanya pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hampir sama, yaitu membutuhkan waktu 15-16 tahun untuk memperoleh gelar sarjana. Bila ditinjau dari pendidikan dasar atau pendidikan menengah saja terdapat perbedaan dari lama pendidikan di Australia dan Indonesia, tetapi untuk pendidikan tinggi relatif sama antara Australia dan Indonesia.

Wajib belajar di Australia dan Indonesia relatif sama untuk jalur pendidikannya yaitu setingkat SD dan SMP, tetapi bila ditinjau dari lamanya pendidikan terlihat perbedaan satu tahun antara Australia dan Indonesia. Australia wajib belajarnya 10 tahun (SD 6/7 tahun dan SMP 4/3 tahun) dan Indonesia wajib belajarnya 9 tahun (SD 6 tahun dan SMP 3 tahun).

Lamanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Australia dan Indonesia relatif sama yaitu 12 tahun, tetapi bila ditinjau dari jalur pendidikan terdapat perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Australia dan Indonesia.

Di Australia lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbeda-beda pada setiap negara bagian dan wilayah daratan, dikarenakan diberikannya kewenangan seluas-luasnya (otoritas penuh) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan di Indonesia, lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah relatif sama untuk setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota).

Adapun pengaruh pendidikan Australia terhadap Indonesia sangat banyak salah satunya adalah begitu banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mengingat hubungan Indonesia dengan Australia sangat dekat dan dari segi letak geografisnya pun Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat.

e. Pengaruh Konsep Pendidikan Jerman dan Australia terhadap Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu komponen utama setelah ketersediaan sumber daya alam untuk memajukan negara. Indonesia telah 66 tahun merdeka dari tangan penjajah tetapi masih berstatus negara berkembang. Ini dikarenakan masih minimnya tingkat pendapatan di negara kita. Hal ini disebabkan oleh pengangguran yang terlalu banyak dan kemiskinan yang belum dapat diberantas.

Pengangguran menyebabkan seseorang tidak mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, lama-kelamaan kemiskinan pun akan menghampiri. Kemiskinan inilah yang membuat banyak anak bangsa tidak dapat bersekolah. Mereka cenderung membantu tanggungan hidup yang seharusnya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Seharusnya, di usia muda mereka menuntut ilmu setinggi-tingginya. Agar mereka kelak dapat memperbaiki nasib hidupnya dan secara otomatis mengurangi tingkat kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran di negara kita.

Dengan melihat begitu jauh tertinggalnya pendidikan di Indonesia dari negara Jerman dan Australia, namun banyak hal yang masih dapat dilakukan, seperti di Jerman dan Australia memberlakukan pendidikan gratis dan semua warga negara memperoleh pemerataan hak mendapatkan pendidikan. Indonesia sebenarnya secara teks sudah sama dengan kedua negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 4, namun yang menjadi persoalan adalah dalam realisasinya.

Penulis sangat yakin apabila pemerintah mengakomodir 2 hal tentang pendidikan yaitu 1) pemerataan pendidikan dan penghargaan

terhadap prestasi pendidikan. Mungkin ada pertanyaan kenapa banyak orang ingin belajar ke Jerman dan Australia?, ada tiga alasan penting menurut penulis harus kita perhatikan;

- 1) Jerman dan Australia adalah salah satu negara paling maju di Dunia, bahkan Jerman menduduki peringkat ke-3 setelah Amerika dan Jepang dalam bidang ekonomi
- 2) Kualitas Pendidikan dan penelitian sangat baik, dan
- 3) Biaya pendidikan murah. Pemerintah dan masyarakat di Australia menganut sistem sosial demokrat yang menjamin semua warganya mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak.

Berdasarkan dari beberapa pandangan di atas, kita menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini memang berada di peringkat yang kurang membanggakan. Namun kondisi ini bukan merupakan alasan untuk terus merasa terpuruk, karena sistem pendidikan Indonesia juga telah menghasilkan juara-juara olimpiade di bidang Matematika, Fisika dan Biologi. Artinya, Indonesia masih mempunyai potensi yang apabila dikelola dengan baik akan berubah menjadi kekuatan yang mampu mengimbangi negara-negara maju seperti Jerman dan Australia tersebut.

Salah satu upaya yang bisa dijadikan *starting point* bagi upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan memenuhi kelemahan dan kelebihanannya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kaji banding (*Study Comparative*) dengan sistem negara lain yang lebih baik, seperti halnya Jerman dan Australia misalnya, sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia, kelak Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berada di barisan terdepan dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik.

C. Penutup

Studi perbandingan pendidikan merupakan studi yang sangat penting demi mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkualitas sehingga dapat memajukan Negara Indonesia kelak. Kemiskinan dan kebodohan

adalah faktor utama ketertinggalan negara Indonesia, artinya dengan melihat pola/ Sistem pendidikan di Jerman dan Australia, kiranya dapat termotivasi dan dapat mengevaluasi dari sejumlah kekurangan sehingga ke depan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik, karena selain SDA yang melimpah, Indonesia juga harus mempersiapkan SDM yang handal dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Adams, Don (2005). *Educational Pattern In Contemporary Societies*, In. Thut (Eds.), *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwasilah, Chaedar (2008). *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya.
- Artikel "Indonesia's education equity goals 'moderate', UNESCO report shows". The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008
- Australian Bureau of Statistics (1999). *Schools; Australia 1993*, Canberra: ABS.
- Cramer, John Francis dan Browne, George Stephenson (1956). *Contemporary Education*, New York: Harcourt Brace.
- D' Cruz J and P. Langford (1990). Eds, *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire.
- Elley, B. W. (1992). *How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy*, The Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achievement.
- Frackman, dkk (1993). *Higher Education policy in Germany: In Goedegebuure, Leo et al (Eds), Higher Education Policy: An International Comparative Perspective*, Paris: Pergamon Press.
- H. Mohle (1992). *German Democratic Republic: System of Education*, In B. R. Clarke and Neave, (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1, Oxford: Pergamon Press.
- Hoerudin, Wahyu Cecep, dkk (2009) *Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia*, Universitas Pendidikan Bandung.
- <http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>

- <http://www.atdiknas-canberra.org/sekolah-sd-sma/sistem-pendidikan-di-australia.html>; Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, Sistem Pendidikan Australia, Rabu, 17 Maret 2011.
- J. T. Fey (1985). *System of Education of Federal Republic of Germany*. In F. Husen and Postlethwaite (Eds), *International Encyclopedia of Education*. New York: Pergamon Press.
- Lawson, F. Robert (2000). *Reconstruction Education: East German School and Universities after Unification by Rosalin M. O Princhard*, (Book Review), In *Comparative Education Review*, Vol. 44 No. 1, Februari.
- Lin-Huber, A. Margrith (1998). *Kulturspezifischer Spracherwerb*, Bern: Verlag Hans Huber.
- L. Ingvarson and Chadbourne (1994). Eds., *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Apparaisal*, Melbourne: ACER.
- Syahnur, Agustiar (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung.
- Teichler, U. and Kehm, B. (1992). *System of Higher Education of Federal Republic of Germany*. In Clarke, B. R., and Neave, G. (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press).
